

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cet 2, Total Media, Jakarta, 2009.
- Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Azhari, F.A., *Menemukan Demokrasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A.Muktie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2003
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 1998.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT.Rineka citra, Jakarta, 2003.
- Muchammad Ali Safa'at, 2010, *Parlemen Bikameral*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm.23.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Revita Aditama, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda, *Politik ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- _____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, 2012,
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Wicipto Setiadi, ketua Tim peneliti BPHN, *Program Legislasi Nasional 2012*, Tanpa penerbit, Jakarta, 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Data Elektronik (jurnal hukum)

<http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/08/03/mengukur-kinerja-dpr-ri-periode-2009-2014/>

diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 12.00

<http://www.unm.ac.id/files/surat/UU12-2011Lengkap.pdf> diakses pada tanggal 24

September 2016 pada pukul 04.00 Wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a73a19b652/dpr-periode-2009-2014--hanya-setujui-126-ruu-jadi-undang-undang> diakses pada tanggal 26

September 2016 pukul 02.29

<https://annisakhasyafadila.wordpress.com/2014/03/17/permasalahan-fungsi-legislasi-dpr-periode-2009-2014/> diakses pada tanggal 26 September 2016 pukul 02.56

<http://www.dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-116-2014.pdf> diakses pada tanggal 26 September 2016 pukul 18.10

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_Kebijakan_Penyusunan_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2011_slide.pdf diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 14.00.

<http://parlemen.net/wp-content/uploads/2015/11/231211-Laporan-Baleg-Prolegnas-2012-16Des12.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 14.05.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b063fdb092e/dpr-tetapkan-66-ruu-prolegnas-2014> diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 19.34

<http://www.pemilu.com/berita/2014/10/menakar-kinerja-dpr-periode-2009-2014/> diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 18.12

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_87_Majalah%20Oktober%202014.pdf diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 03.35

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%203%20Vol%201%20No%203.pdf> diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 16.20

Lain-lain

Risalah Sidang MK terkait dengan sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor 73, 82, 76, 83, 79/PUU-XII/2014